

EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN: EVALUASI KEBERHASILAN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DI DESA LOYANG KABUPATEN INDRAMAYU

Nina Karinina

ABSTRACT

This article discusses the effectivity of women empowerment programme implementation. The discussion is focussed on two aspects: the role of institution for empowering women, and the changing economic condition of those engaged as members of that institution. In the aspect of community organization as a method of social work, there was found positive supports of the local community. As the consequently, the social institution had been established. The role of this institution is a place for empowering the vulnerable women to social economic condition. Three years after that empowerment programme implementation from 35 samples of respondents showed that : 68,57 % of them were able to increase their monthly income, 28,57 % just the same as before, and the contrary only 2,86 % of them decreased. The percentage of that increased ranged between 20 % and 150 %. The modus was 150 %, and mean 97,29 %. From the economic point of view, the non parametric statistic different test showed that there were a significant increased of their monthly income. Nevertheless, according to the standard of poverty level in that local area, 60 % of them were remained below of that standard. It was concluded that the community organization was effective to increase family income, and women had power to support family economy. However, in order to release them out of poverty, the programme continuity and coordination among other sectors were needed.

Keywords : community organization, income, poverty line, empowerment.

1. PENDAHULUAN

Riset adalah salah satu kegiatan dalam ruang lingkup administrasi pekerjaan sosial. Dalam kaitan administrasi pekerjaan sosial tersebut, perlu diketahui bagaimana efektivitas program yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial suatu masyarakat. John Kidneigh mendefinisikan administrasi pekerjaan sosial sebagai: *"the process of transforming social policy into services..... a two way process: 1). Transforming policy into concrete social services, and 2). The use of experience in recommending modification of policy"* (Skidmore, et al, 1994: 107-108). Oleh karena itu, dalam kaitan penerapan program pemberdayaan perempuan yang diujicobakan, perlu

dievaluasi untuk mengetahui bagaimana efektivitasnya. Penelitian evaluatif yang dimaksud dalam hal ini adalah penelitian yang terkait dengan keputusan administrasi praktek pekerjaan sosial. Dengan demikian, evaluasi ini pada dasarnya membuat asesmen yang objektif untuk menentukan apakah kegiatan yang dilaksanakan baik atau tidak, serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan tersebut berhasil atau tidak berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Dari hasil evaluasi tersebut apakah program perlu dilanjutkan, disempurnakan, atau bahkan perlu diberhentikan.

Artikel ini menyajikan hasil penelitian evaluasi ujicoba pemberdayaan perempuan yang dikategorikan rawan sosial ekonomi, sebagai

salah satu program di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Keluarga Kementerian Sosial. Salah satu lokasi ujicoba yaitu Desa Loyang Kabupaten Indramayu. Penelitian evaluatif ini dilakukan pada bulan September tahun 2009. Adapun ruang lingkup materi bahasan dalam artikel ini meliputi:

- 1). Pembentukan organisasi masyarakat yang mampu berperan untuk memberdayakan perempuan di daerah setempat.
- 2). Pemahaman anggotanya tentang organisasi yang telah terbentuk
- 3). Kegiatan organisasi dalam pemberdayaan ekonomi.
- 4). Perubahan kondisi ekonomi anggota LPP Mandiri.
- 5). Keberdayaan anggota LPP Mandiri di bidang ekonomi.

Metode penelitian yang digunakan dalam evaluasi uji coba ini bersifat *ex post facto*. Dalam konteks penelitian *ex post facto*, Kerlinger mendefinisikan sebagai: penelitian empiris yang sistematis, namun peneliti tidak mempunyai kontrol langsung terhadap variabel bebas, karena manifestasi variabel tersebut telah terjadi atau sulit dimanipulasikan. Inferensi tentang hubungan antar variabel dibuat tanpa intervensi langsung, tetapi dari variasi ikutan dari variabel independen dan dependen (*Ex post facto research is systematic empirical inquiry in which the scientist does not have direct control of independent variables because their manifestations have already occurred or because they are inherently not manipulable. Inferences about relations among variables are made without direct intervention, from concomitant variation of independent and dependent variables*) (Kerlinger, F.N., 1976:379). Selanjutnya, dikatakan oleh Kerlinger, antara lain bahwa dalam ilmu-ilmu sosial harus dilaksanakan secara *ex post facto*, karena banyak permasalahan penelitian di bidang tersebut tidak menggunakan acuan eksperimen, ada berbagai variabel penting yang tidak dimanipulasikan yang sifatnya *ex post facto*, dan kita tidak dapat menghindarinya (Kerlinger, 1994: 392).

Rancangan penelitian yang diterapkan pada kegiatan evaluasi ini adalah satu kelompok sebelum dan sesudah pemberdayaan, dengan diagram sebagai berikut:

Y_0	X	Y_1
-------	-----	-------

Y_0 = Kondisi sebelum pemberdayaan (variabel dependen)

Y_1 = Kondisi sesudah pemberdayaan (variabel dependen)

X = variabel independen yang tidak dimanipulasi (tidak direayasa).

Teknik pengumpulan data primer adalah wawancara dengan anggota LPP Mandiri sejumlah 35 orang untuk mendapatkan informasi tentang kondisi sebelum dan sesudah pemberdayaan ekonomi. Untuk menganalisis bagaimana perubahan kondisi anggota LPP Mandiri khususnya di bidang ekonomi, digunakan analisis statistik non parametrik dengan uji beda "*Wilcoxon Matched Pair Signed Rank*" untuk dua sampel berkait.

II. PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

Dalam kaitan uji coba pemberdayaan perempuan di Desa Loyang tersebut, secara teknis pelaksanaan didasari dengan penerapan pengorganisasian masyarakat sebagai salah satu metode pekerjaan sosial (terjemahan dari *community organization*), yang dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Mandiri yang terbentuk dari unsur masyarakat sebagai pelaksana di lapangan.

Dalam kaitan pengorganisasian masyarakat, George Brager dan Harry Specht di dalam bukunya berjudul "*Community Organizing*" mendefinisikan *community organization* adalah metode intervensi bagi perorangan, kelompok orang, dan organisasi terlibat dalam kegiatan yang terencana untuk mempengaruhi masalah-masalah sosial. Hal tersebut berkait dengan peningkatan, pengembangan, dan atau perubahan institusi-institusi sosial, serta melibatkan dua proses utama yang terkait: perencanaan yang meliputi identifikasi area masalah, diagnosis berbagai penyebab, dan perumusan solusi, dan pengorganisasian yang meliputi pengembangan lembaga-lembaga perwakilan, dan mengubah rencana strategi untuk mempengaruhi berbagai kegiatan (*a method of intervention whereby individuals, groups and organization engage in planned action to influence social*

problems. It is concerned with the enrichment, development, and/or change of social institutions, and involve two major related processes: planning (that is identifying problem areas, diagnosing causes, and formulating solutions) and organizing (that is, developing the constituencies and devising the strategies necessary to affect actions) (Skidmore, et al, 1994: 92).

Pengorganisasian masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan di Desa Loyang berhasil dibentuk suatu organisasi yang diberi nama Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Mandiri. Organisasi ini antara lain berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro, yang kegiatannya menyelenggarakan simpan pinjam uang bagi anggota. Peran organisasi sebagai lembaga keuangan mikro adalah memberdayakan anggotanya di bidang ekonomi.

1. Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Mandiri

a. Kronologi Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Mandiri.

LPP Mandiri ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di daerah setempat. Secara kronologi, Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) "Mandiri" di Desa Amis dan Desa Loyang Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu berdiri dengan dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian kerjasama tentang ujicoba model pemberdayaan perempuan antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial; dalam hal ini, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial sebagai pihak pertama, dengan ketua LPP Mandiri sebagai pihak kedua. Dalam ketentuan umum perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia dengan Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Mandiri (Nomor 234 B-1/PS/IX/2006, dan Nomor: 01/LPP MANDIRI-INDR/MOU/IX/2006) tentang ujicoba model pemberdayaan perempuan, disebutkan bahwa: "Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) "Mandiri" adalah lembaga yang anggota dan pengurusnya terdiri dari perempuan yang sudah berkeluarga dan atau perempuan lajang rawan sosial ekonomi yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan

untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggotanya, memecahkan masalah sosial yang dialaminya". Sementara istilah pemberdayaan perempuan yang dimaksud adalah: "proses peningkatan kemampuan yang memiliki kerawanan sosial ekonomi untuk meningkatkan harkat dan martabatnya melalui pemantapan motivasi dan peningkatan kapasitas yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan" (BAB I pasal 2).

Tujuan perjanjian kerjasama tersebut pada intinya adalah :

"meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi mendayagunakan sumber-sumber dan peluang, meningkatkan pendapatan perempuan melalui peningkatan usaha produktif, mempercepat dan mempermudah penyaluran dan menyebarkan bantuan modal bagi anggota LPP "Mandiri" (BAB II pasal 3).

Sementara itu, dalam perjanjian kerjasama Nomor 189/PS/PK/XI/2007 dan Nomor 01/LPP MANDIRI-INDR/XI/2007 tentang pengembangan ujicoba model pemberdayaan perempuan tujuannya adalah :

"terlaksananya kegiatan pengembangan ujicoba model pemberdayaan perempuan dengan memberi motivasi baik kepada sasaran keluarga calon penerima kegiatan maupun keluarga pada umumnya yang dapat dijadikan sumber pemecahan masalah dan dukungan terhadap pelaksanaan program, tercapainya peningkatan pendapatan perempuan yang tergolong rawan sosial ekonomi melalui bantuan stimulan, terwujudnya kemandirian perempuan dan kesejahteraan sosial keluarga, (Bab II pasal 3).

Adapun ruang lingkup kegiatan pemberdayaan perempuan melalui LPP Mandiri seperti tertuang di dalam perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 234 B-1/PS/IX/2006 dengan LPP Mandiri Nomor 01/LPP MANDIRI-INDR/MOU/IX/2006 adalah bahwa :

"pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya, penanganan masalah sosial perempuan dengan pendekatan lembaga, penyebaran nilai-nilai yang lebih memperhatikan hal-hal perempuan" (Bab III pasal 4).

Sementara pada perjanjian kedua lembaga tersebut Nomor 189/PS/PK/XI/2007 dan Nomor 01/LPP MANDIRI-INDR/XI/2007, ruang lingkup kerjasama di antara kedua lembaga mencakup :

"pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya, peningkatan kesejahteraan dengan sasaran perempuan melalui pengguliran dana, penanganan masalah sosial perempuan dengan pendekatan kelembagaan"(Bab III pasal 4).

Dalam pendirian LPP Mandiri didukung oleh tokoh-tokoh di daerah setempat seperti kepala desa, tokoh agama, dan organisasi Pemberdayaan dan organisasi Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Amis Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu.

b. Sifat Kelembagaan.

Secara fungsional, lembaga ini merupakan suatu perkumpulan yang tugasnya memberdayakan para anggotanya, adapun pengurus dan anggotanya adalah kaum perempuan. Secara organisasi, komponen kelembagaan yang terbentuk pada lembaga ini adalah penasihat, ketua, sekretaris, bendahara, pendamping dan ketua/pendamping kelompok anggota LPP. Komponen yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah ketua, atas persetujuan anggota LPP dalam rapat tahunan.

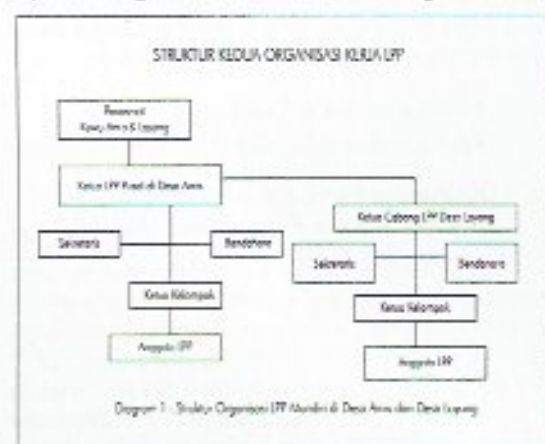
c. Keanggotaan.

Yang menjadi anggota LPP Mandiri adalah perempuan yang tergolong rawan sosial ekonomi dan mempunyai usaha dan atau keterampilan di bidang tertentu. Jumlah anggota LPP Mandiri yang tercatat di dua wilayah desa masing-masing adalah: 98 orang bertempat tinggal di Desa Amis Kecamatan Cikedung, dan 70 orang di Desa Loyang.

d. Kepengurusan.

Pengurus LPP dipilih dari orang-orang diperkirakan dapat melaksanakan tugas-tugas administrasi pembukuan, oleh karena itu yang menduduki anggota kepengurusan LPP sesuai dengan tenaga tersedia orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan dikenal pekerjaannya di bidang kesejahteraan karena pengalaman di program lain. Mekanisme pemilihan untuk mengangkat seseorang menjadi pengurus LPP tersebut atau memberhentikannya melalui rapat anggota, yang dikuatkan dengan surat keputusan dari Kepala Desa Kuwu.

Struktur organisasi kegiatan LPP Mandiri yang wilayahnya mencakup dua desa, dan secara organisatoris ada dua unsur satuan kerja yaitu sebagai pusat yang berkedudukan di Desa Amis, dan sebagai cabang yang berkedudukan di Desa Loyang. Hal tersebut didasarkan pada alasan antara lain: pertama, LPP yang beroperasi di Desa Loyang sesuai dengan kronologi pada awal pendiriannya, merupakan wilayah kerja LPP Mandiri yang beroperasi di Desa Amis ; kedua, sampai saat ini ketua LPP Mandiri yang beroperasi di Desa Loyang wajib memberikan laporan kegiatannya kepada ketua LPP yang beroperasi di Desa Amis. Dengan demikian struktur kedua organisasi kerja LPP tersebut apabila digambarkan adalah sebagai berikut:



e. Kegiatan LPP Mandiri.

Kegiatan LPP Mandiri meliputi berbagai jenis yaitu: Usaha ekonomi produktif seperti menyablon dan menjahit, usaha jasa simpan pinjam, kegiatan keagamaan seperti jamiahan. Sasaran meliputi adalah anggota LPP yang pada umumnya tergolong rawan sosial ekonomi.

f. Hak dan Kewajiban Anggota LPP Mandiri.

Sesuai dengan tujuan program pemberdayaan "Wanita Rawan Sosial Ekonomi", dalam perkumpulan ini hak anggota LPP yang utama adalah mendapat pinjaman sejumlah uang dan berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan cara mencicil sesuai dengan batas waktu dan memberi uang jasa yang telah disepakati bersama. Dalam perjanjian kerjasama Nomor 234 B-1/PS/IX/2006 dan Nomor 01/LPP MANDIRI-INDR/MOU/IX/2006, bab V pasal 8 juga antara lain disebutkan: *"bantuan yang diberikan oleh*

pemerintah kepada sasaran program melalui LPP Mandiri bersifat hibah dan mengikat, yang artinya setiap sasaran program yang memperoleh bantuan dana stimulan wajib mengembalikan dana tersebut secara mengangsur kepada pihak kedua¹, besarnya jumlah angsuran yang harus dikembalikan akan ditentukan oleh LPP Mandiri didasarkan hasil kesepakatan anggota sasaran program².

g. Pembiayaan.

Biaya yang digunakan untuk kegiatan LPP Mandiri diperoleh dari pemerintah pusat melalui Departemen Sosial. Pada tahap pertama, berdasarkan perjanjian kerjasama pada tahun 2006 antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial dengan penerima bantuan yang dalam hal ini LPP Mandiri, diperoleh dana bantuan sebesar Rp 140.000.000,- yang dialokasikan untuk dua desa yaitu Amis dan Loyang (masing-masing mendapat Rp 70.000.000,- untuk 70 orang). Selanjutnya, modal pinjaman sedikit berkembang dengan adanya tambahan dana jasa pinjaman yang jumlahnya relatif kecil.

Khusus untuk LPP Mandiri yang beroperasi di wilayah Desa Amis, selanjutnya tahun kedua, pada tahun 2008, LPP Mandiri mendapat tambahan dana dari pemerintah untuk pengembangan sasaran sebanyak 50 orang atau lebih *wanita rawan sosial ekonomi* yang dikuatkan melalui perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia dengan LPP Mandiri (Nomor: 189/PS/PK/XI/2007, dan Nomor: 01/LPP Mandiri-INDR/XI/2007). Dalam perjanjian kerjasama tersebut, Direktur Pemberdayaan Keluarga sebagai pihak pertama dan Ketua LPP Mandiri sebagai pihak kedua antara lain disepakati bahwa :

"tugas pihak pertama menyediakan dan menyerahkan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada pihak kedua berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyediakan pedoman operasional uji coba program pemberdayaan perempuan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan".

Sementara itu, tugas dan tanggung jawab pihak kedua adalah :

"Menyeleksi dan menentukan sasaran program pengembangan uji coba pengemba-

ngan model, sesuai kriteria yang ditetapkan sebanyak 50 orang atau lebih menyalurkan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif baik berupa uang tunai, barang atau peralatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan sasaran program, pengadministrasian kegiatan pemberdayaan, mengatur pengembalian bantuan stimulan dan pengulirannya kepada sasaran yang lainnya, melakukan pembinaan/pendampingan sosial secara berkelanjutan kepada sasaran program".

Pada dua tahun kemudian yaitu tahun 2008, didasarkan pada perjanjian kerjasama Nomor 189/PS/PK/XI/2007 dan Nomor 01/LPP Mandiri-INDR/XI/2007 pada tahun 2008 antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial dengan ketua LPP Mandiri tersebut, diperoleh lagi tambahan dana bantuan pengembangan kegiatan sejumlah Rp 50.000.000,-

h. Pengelolaan Dana Bantuan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Oleh LPP Mandiri Di Kecamatan Cikidang Kabupaten Indramayu.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di Desa Amis dan Desa Loyang dalam praktek di lapangan dimulai pada tahun 2007. Dana bantuan yang diterima sejumlah Rp 140.000.000,- untuk dua desa seperti dikemukakan terlebih dahulu pengelolaannya digulirkan sebagai uang pinjaman bagi anggota LPP Mandiri untuk modal usaha. Jumlah anggota pada awal kegiatan seluruhnya 140 orang, mereka tinggal di Desa Amis sebanyak 70 orang, dan 70 orang di Desa Loyang.

Pada dasarnya bantuan dana tahap pertama tersebut yang jumlahnya sebesar Rp 140.000.000,- diberikan oleh pemerintah pusat untuk dialokasikan kepada 140 orang anggota LPP Mandiri, sehingga masing-masing akan mendapatkan Rp 1.000.000,-. Namun demikian dalam praktek di lapangan, pada kenyataannya ketentuan pengalokasian dana harus disesuaikan dengan kondisi anggota LPP Mandiri. Dalam hal ini, anggota yang usahanya relatif kecil seperti dagang makanan (seperti sayur lodeh, kue-kue) modal yang diperlukan di bawah nilai Rp 1.000.000,- sudah mencukupi. Oleh karena itu, jumlah pinjaman akan

berbeda antara yang satu sama lain. Dengan demikian Wanita kategori rawan sosial ekonomi jumlahnya lebih banyak dari yang ditargetkan (target semula untuk 140 orang tetapi bisa mencapai 160 orang) yang mendapat akses pinjaman modal dengan uang jasa pinjaman yang relatif rendah (sebesar 2 %), yang dapat memutus mata rantai para rentenir. Dalam tahap selanjutnya, diketahui berdasarkan catatan penggalangan uang pinjaman yang besarnya berkisar antara Rp 500.000,- sampai Rp 2.500.000,-

Untuk mempermudah pendampingan usaha dan penagihan cicilan uang pinjaman, anggota LPP dibagi menjadi 16 kelompok, yaitu di Desa Amis 9 kelompok dan 7 kelompok di Desa Loyang.

Berdasarkan informasi ketua LPP Mandiri, seleksi untuk calon peminjam modal dilakukan dengan identifikasi kartu keluarga untuk mengetahui kondisi keluarga, dan di samping itu diutamakan yang sudah memiliki usaha sehingga pinjaman dapat bermanfaat untuk mengembangkan usaha. Uang pinjaman dicicil selama 10 bulan (sepuluh kali cicilan).

Hambatan dalam pengelolaan dana bantuan untuk pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi antara lain : ada beberapa orang yang usahanya terhenti sehingga sulit mengembalikan uang pinjaman tetapi masih dapat dihubungi dalam acara pertemuan rutin, usia peminjam yang usianya di atas 55 tahun cukup banyak namun masih berkeinginan untuk menjalankan usaha, padahal menurut ketentuan secara tidak tertulis dari pejabat Dinas Sosial usia peminjam harus di bawah 50 tahun, dana untuk operasional sementara ini disediakan dari uang jasa pinjaman anggota LPP yang jumlahnya relatif kecil. Ditinjau dari segi penggalangan dana pinjaman, sampai tahun 2009 sudah mencapai tiga kali penggalangan. Namun demikian ditinjau dari segi keberhasilan usaha sebagian besar masih rendah.

2. Karakteristik Anggota LPP Mandiri Di Desa Loyang

Ditinjau dari segi usia, berdasarkan catatan daftar anggota LPP Mandiri yang berdomisili di Desa Loyang, pada awal kegiatan ujicoba pemberdayaan perempuan di desa ini berjumlah 70 orang. Usia mereka paling muda adalah 17 tahun dan yang paling tua 42 tahun. Yang paling banyak adalah berusia antara 17-21 tahun (31,43 %), lainnya adalah 22 -26

tahun (15,7 %), 27-31 tahun (21,43%), 32-36 tahun (17,14%) dan yang berusia antara 37-42 tahun (14,29%) (Laporan pengembangan uji coba model pemberdayaan perempuan, LPP Mandiri, tahun 2007). Namun kemudian, batasan usia mereka yang terdaftar menjadi anggota LPP Mandiri telah merambah usia yang lebih tua sampai di atas 50 tahun. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan menggunakan sampel sebanyak 35 orang anggota LPP Mandiri di Desa Loyang dapat diketahui bagaimana usia mereka sebagai berikut: Usia 21-25 tahun (11,43%), 26-30 tahun (28,57%), 31-35 tahun (37,14%), 36-40 tahun (14,28%) . Sementara usia mereka antara 41-45 tahun , 46-50 tahun, dan di atas 50 tahun masing-masing sebesar 2,86%.

Status kekeluargaan anggota LPP sebagian besar (88,57%) berstatus menikah, dan hanya sebagian kecil berstatus janda (11,43%). Adapun jumlah anak yang dimiliki bervariasi antara satu sampai lima orang. Mereka yang memiliki satu orang anak sebanyak 37,14%, dua orang anak 34,29%, tiga orang anak 8,57%, empat orang anak 5,71%, lima orang anak 2,86%, dan ada juga yang tidak memiliki anak sebanyak 11,43%.

Ditinjau dari pendidikan yang pernah dicapai oleh anggota LPP, yang paling banyak adalah tamat SD sebanyak 48,57%, bahkan ada juga diantara mereka sebanyak 2,86% yang tidak pernah sekolah. Yang lainnya adalah tidak tamat SD 11,43%, tidak tamat SLTP 11,43%, tamat SLTP 14,28%, dan tamat SLTA sebanyak 11,43 %. Dengan demikian, anggota LPP sebagian besar hanya berpendidikan setingkat SD saja, baik tamat, tidak tamat dan tidak pernah sekolah. Status pendidikan anak-anak mereka sebagian besar adalah masih bersekolah (54,72%). Lainnya belum sekolah 15,09%, putus sekolah 3,77%, sudah menikah 15,09%, dan sudah bekerja 5,66%. Sedangkan sebanyak 5,66% tidak memberikan keterangan.

Ditinjau dari segi pekerjaan, semua anggota LPP mengatakan punya pekerjaan yang dapat menghasilkan nafkah bagi keluarga masing-masing. Hal ini patut dibanggakan karena mereka termasuk orang-orang yang produktif secara ekonomi. Bidang-bidang pekerjaan mereka pada dasarnya dapat dikategorikan tiga macam, yaitu: bertani 42,86%, berdagang adalah yang paling banyak (dagang

pakaian, sembako, sayuran, dll) yaitu 51,42%, dan penjahit pakaian 5,71%. Namun demikian, yang paling banyak adalah berdagang.

3. Pemahaman Anggota Tentang LPP Mandiri Di Desa Loyang

Dari 35 orang subjek dalam pengamatan ini, sebagian besar anggota LPP Mandiri memahami fungsi LPP, dan hanya 8,57% mengatakan tidak tahu. Mereka yang memahami fungsi LPP, masing-masing memberikan berbagai jawaban dan yang paling banyak atau 77,14% adalah yang mengatakan tempat pembinaan dan meminjamkan uang kepada anggota. Lainnya: mengatakan tempat membayar uang pinjaman (65,71%), membantu menyelesaikan masalah (65,71%), tempat berkumpul anggota (62,86%), tempat menabung uang (37,14%).

Mengenai pemahaman tentang apa yang menjadi hak anggota LPP, ada berbagai jawaban yang dikemukakan oleh mereka, dan paling banyak yang mengatakan menerima bantuan atau pinjaman modal usaha (80%). Sementara itu, juga mereka mengatakan tempat menyampaikan pendapat (60%), memilih pengurus (48,57%), dipilih menjadi pengurus (25,71%), dan mengikuti menghadiri rapat tahunan (8,57%). Sesuai dengan apa yang menjadi hak anggota LPP tersebut, setiap orang mengatakan berbagai pendapat tentang kewajiban anggota, yaitu: membayar cicilan pinjaman uang/mengembalikan bantuan modal (88,57%), membayar cicilan pinjaman uang (82%), menghadiri pertemuan (71,43%), membayar iuran (48,57%), dan menabung (34,89%).

III. Kegiatan organisasi LPP Mandiri Dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota

Kegiatan LPP Mandiri dalam upaya pemberdayaan ekonomi anggotanya, pada dasarnya meliputi kegiatan-kegiatan yang dimulai dari seleksi dan kemudian pemberian bantuan, yang dalam hal ini bantuan dana pinjaman uang secara bergulir bagi semua anggota LPP. Bagaimana kegiatan pemberdayaan ekonomi dan akibatnya terhadap kondisi ekonomi mereka adalah sebagai berikut:

1. Seleksi

Untuk menjadi anggota LPP sebagian besar (74,29%) mengatakan melalui seleksi, dan

sebagian kecil (25,71%) mengatakan tidak melalui seleksi. Dalam proses untuk menjadi anggota LPP, sebagian besar (71,43%) mendaftar sendiri, dan sebagian kecil (28,57%) didaftarkan oleh orang lain. Mereka yang mendaftar menjadi anggota LPP secara sendiri sebagian besar (72%) mengatakan mendapat informasi dari ketua LPP. Lainnya karena informasi dari teman (12%), dan informasi dari petugas desa dan Rukun tetangga masing-masing 8%. Demikian juga mereka yang mengatakan didaftarkan oleh orang lain, informasinya diperoleh sumber yang sama yaitu petugas desa dan teman, masing-masing sebanyak 10%, dan yang mengatakan dari ketua LPP (80%).

Alasan untuk mengikuti program pemberdayaan perempuan dan tergabung pada LPP Mandiri, paling banyak adalah ingin mendapat bantuan modal agar usaha lebih maju (31,43%). Selain itu yang banyak dikemukakan adalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga (25,71%), ingin punya penghasilan sendiri tidak tergantung suami (20%), untuk menambah pengetahuan dan bergaul dengan teman (11,43%), ingin maju (5,71%), sedangkan karena ingin rukun dalam keluarga (2,86%) dan menambah modal arisan (2,86%). Adapun yang menjadi harapan keikutsertaan mereka dalam program tersebut yang paling banyak dilonarkan adalah agar ekonomi lebih baik sehingga kebutuhan hidup terpenuhi (37,14%). Lainnya mengatakan: mendapat pinjaman uang secara ringan (25,71%), agar usaha lebih maju (22,86%), kesejahteraan sosial keluarga meningkat (8,57%), mandiri secara ekonomi (8,57%). Harapan-harapan mereka seperti dikemukakan di atas, menurut mereka pada umumnya (97,14%) telah tercapai, hanya beberapa orang saja (2,86%) yang mengatakan tidak tercapai.

2. Penerimaan Bantuan Pinjaman Bergulir

Pinjaman uang secara bergulir dari LPP pada tahap permulaan yang diberikan kepada masing-masing anggota sesuai ketentuan berjumlah Rp 1.000.000,- per orang. Namun hanya sebagian kecil saja dari mereka (2,86%) yang mendapat pinjaman Rp 500.000,-. Dengan demikian pada umumnya mendapat pinjaman sebesar Rp 1.000.000,-. Hal ini karena jumlah anggota LPP Mandiri bertambah banyak dan pinjaman disesuaikan dengan keadaan pengembalian uang pinjaman yang

masuk di kas. Seperti diketahui dalam perjanjian kerjasama uji coba pemberdayaan perempuan seperti dikemukakan lebih dahulu bahwa bantuan uang tersebut bersifat hibah, namun diatur harus ada pengkuliran kepada anggota sasaran lainnya. Dalam hal ini semua anggota LPP mengetahui bahwa pinjaman tersebut harus bergulir. Adapun bentuk pengelolaan uang yang dipinjam dari LPP ada dua bentuk yaitu dikelola sendiri dan dikelola bersama suami. Namun sebagian besar (65,71%) mereka mengatakan pengelolaannya dilakukan bersama suami, dan yang lainnya mengatakan dikelola sendiri (34,29%). Sementara itu, tidak ada yang mengatakan dikelola secara kelompok yang dalam hal ini di antara sesama anggota LPP.

3. Manfaat Bantuan

Dalam hal bantuan uang yang dihibahkan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan warga yang dalam pengelolaannya berupa pinjaman modal usaha bagi masing-masing anggota LPP Mandiri, sebagian besar anggota LPP (65,71%) merasakan pinjaman modal tersebut sangat bermanfaat, dan sebanyak 22,86% mengatakan bermanfaat. Hanya sebagian kecil saja (11,43%) yang mengatakan kurang bermanfaat. Adapun alasan mereka yang mengatakan kurang bermanfaat sebanyak tiga orang (75%) mengatakan bahwa uang hibah dalam bentuk pinjaman secara bergulir yang diterima oleh mereka belum menghasilkan apa-apa, dan satu orang lainnya (25%) mengatakan bahwa uang pinjaman tersebut langsung habis.

Sementara itu, dari delapan orang yang mengatakan bantuan uang berupa pinjaman modal usaha yang telah mereka terima bermanfaat, karena dapat meningkatkan penghasilan (65,22%), dapat menjadi modal awal (26,09%), menjadi modal awal dan meningkatkan penghasilan (8,69%). Senada dengan yang mengatakan bermanfaat, dari 23 orang yang mengatakan sangat bermanfaat, sebagian kecil dari mereka (25%) karena meningkatkan penghasilan cukup besar, dan sebagian besar (75%) mengatakan cukup untuk menjadi modal usaha.

IV. KONDISI EKONOMI ANGGOTA LPP MANDIRI DI DESA LOYANG SEBELUM DAN SESUDAH PEMBERDAYAAN

Kondisi ekonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah gambaran perubahan yang meliputi kondisi-kondisi penghasilan per bulan, dan kebutuhan dasar sehari-hari seperti asupan pangan, pakaian, dan rumah tinggal pada waktu sebelum dan sesudah ada pemberdayaan yang dilaksanakan melalui KPP Mandiri.

1. Gambaran Perubahan Penghasilan

Berdasarkan penghasilan anggota LPP per bulan, diketahui bahwa sebelum pemberdayaan berkisar antara Rp100.000,- sampai dengan Rp 3.000.000,-. Sementara itu, sesudah ada pemberdayaan ternyata ada peningkatan penghasilan yang berkisar antara Rp 150.000,- sampai dengan Rp 4.500.000,-. Untuk mengetahui peningkatan penghasilan pada masing-masing subjek, dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

No Subjek	Penghasilan Per Bulan Dalam Rupiah			
	Sebelum Pemberdayaan (Kondisi Tahun Awal Tahun 2007)	Sesudah Pemberdayaan (Kondisi Tahun 2009)	% Peningkatan	Kondisi Perbaikan
1	500.000,-	1.000.000,-	100	Meningkat
2	500.000,-	500.000,-	0	Tetap
3	500.000,-	500.000,-	0	Tetap
4	450.000,-	1.500.000,-	233,33	Meningkat
5	200.000,-	500.000,-	150	Meningkat
6	500.000,-	500.000,-	0	Tetap
7	900.000,-	1.800.000,-	100	Meningkat
8	1.000.000,-	1.500.000,-	50	Meningkat
9	200.000,-	200.000,-	0	Tetap
10	1.000.000,-	1.800.000,-	80	Meningkat
11	200.000,-	450.000,-	125	Meningkat
12	600.000,-	800.000,-	33,33	Meningkat
13	900.000,-	1.200.000,-	33,33	Meningkat
14	200.000,-	450.000,-	125	Meningkat
15	500.000,-	900.000,-	80	Meningkat
16	1.000.000,-	1.000.000,-	0	Tetap
17	500.000,-	450.000,-	-10	Meningkat
18	400.000,-	1.000.000,-	150	Meningkat
19	2.000.000,-	4.500.000,-	125	Meningkat
20	300.000,-	500.000,-	66,67	Meningkat
21	300.000,-	200.000,-	-33,33	Meningkat
22	2.500.000,-	3.800.000,-	52	Meningkat
23	250.000,-	300.000,-	20	Meningkat
24	600.000,-	600.000,-	0	Tetap
25	200.000,-	500.000,-	150	Meningkat
26	500.000,-	500.000,-	0	Tetap
27	200.000,-	300.000,-	50	Meningkat
28	200.000,-	450.000,-	125	Meningkat
29	100.000,-	500.000,-	400	Meningkat
30	1.300.000,-	1.200.000,-	-7,69	Meningkat
31	150.000,-	150.000,-	0	Tetap
32	900.000,-	200.000,-	-77,78	Meningkat
33	300.000,-	450.000,-	50	Meningkat
34	300.000,-	450.000,-	50	Meningkat
35	300.000,-	450.000,-	50	Meningkat
Media	200.000,-	450.000,-	125	Meningkat

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, diketahui bahwa: dari 35 orang sampel sesudah pemberdayaan hanya satu orang (2,86%) saja yang penghasilannya malah menurun. Sebanyak 10 orang (28,57%), penghasilan mereka tetap atau tidak ada peningkatan. Sementara itu, ada 24 orang (68,57%) yang penghasilannya meningkat. Peningkatan persentase dari mereka yang berhasil meningkatkan penghasilan berkisar antara 20 sampai 150%. Modus persentase peningkatan adalah 125%. Apabila dijumlah persentase total peningkatan penghasilan dari 24 orang tersebut adalah sebesar 2334,99%, jadi persentase rata-rata peningkatan penghasilan dari 24 subjek yang penghasilannya meningkat adalah 97,29%. Modus jumlah penghasilan sebelum pemberdayaan Rp 200.000,-, sedangkan modus jumlah penghasilan sesudah pemberdayaan: Rp450.000,-. Untuk mengetahui bagaimana penghasilan perkapita mereka perbulan sebelum dan sesudah pemberdayaan, dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Kondisi Ekonomi Anggota LPP Mandiri di Desa Loyang Sebelum dan Sesudah Pemberdayaan Berdasarkan Penghasilan Perkapita Perbulan Anggota LPP di Desa Loyang Tahun 2009

No Subjek	Jumlah Anggota Keluarga Tahun 2007-2009	Penghasilan Sebelum Pemberdayaan (tahun 2007)			Sesudah Pemberdayaan (tahun 2009)		
		Penghasilan perbulan (Rp)	Penghasilan perkapita perbulan	Kriteria Kondisi Ekonomi*	Penghasilan Perbulan (Rp)	Penghasilan Perkapita Perbulan	Kriteria Kondisi Sosial Ekonomi**
1	2	250.000	125.000	Tidak miskin	1.000.000	225.000	Tidak miskin
2	2	250.000	125.000	Tidak miskin	200.000	100.000	Miskin
3	2	250.000	125.000	Tidak miskin	300.000	150.000	Miskin
4	4	450.000	112.500	Tidak	1.200.000	275.000	Tidak miskin
5	2	250.000	125.000	Tidak	400.000	200.000	Tidak miskin
6	4	400.000	100.000	Tidak	300.000	125.000	Miskin
7	4	250.000	62.500	Tidak miskin	1.800.000	450.000	Tidak miskin
8	2	1.000.000	500.000	Tidak miskin	1.000.000	500.000	Tidak miskin
9	2	250.000	125.000	Tidak	250.000	125.000	Miskin
10	2	1.000.000	500.000	Tidak miskin	1.000.000	500.000	Tidak miskin
11	2	250.000	125.000	Miskin	450.000	225.000	Miskin
12	4	400.000	100.000	Miskin	300.000	75.000	Tidak miskin
13	2	250.000	125.000	Tidak miskin	1.200.000	600.000	Tidak miskin
14	2	250.000	125.000	Miskin	450.000	225.000	Tidak miskin
15	4	1.000.000	250.000	Tidak miskin	1.000.000	250.000	Tidak miskin
16	2	250.000	125.000	Tidak miskin	400.000	200.000	Tidak miskin
17	2	250.000	125.000	Tidak miskin	1.000.000	500.000	Tidak miskin
18	2	250.000	125.000	Tidak miskin	1.000.000	500.000	Tidak miskin
19	2	250.000	125.000	Tidak miskin	1.000.000	500.000	Tidak miskin
20	2	250.000	125.000	Tidak miskin	1.000.000	500.000	Tidak miskin
21	2	250.000	125.000	Tidak miskin	1.000.000	500.000	Tidak miskin
22	2	250.000	125.000	Tidak miskin	1.000.000	500.000	Tidak miskin
23	2	250.000	125.000	Tidak miskin	1.000.000	500.000	Tidak miskin
24	2	250.000	125.000	Tidak miskin	1.000.000	500.000	Tidak miskin
25	2	250.000	125.000	Tidak miskin	1.000.000	500.000	Tidak miskin
26	2	250.000	125.000	Tidak miskin	1.000.000	500.000	Tidak miskin
27	2	250.000	125.000	Tidak miskin	1.000.000	500.000	Tidak miskin
28	2	250.000	125.000	Tidak miskin	1.000.000	500.000	Tidak miskin
29	2	250.000	125.000	Tidak miskin	1.000.000	500.000	Tidak miskin
30	2	250.000	125.000	Tidak miskin	1.000.000	500.000	Tidak miskin
31	2	250.000	125.000	Tidak miskin	1.000.000	500.000	Tidak miskin
32	2	250.000	125.000	Tidak miskin	1.000.000	500.000	Tidak miskin
33	2	250.000	125.000	Tidak miskin	1.000.000	500.000	Tidak miskin
34	2	250.000	125.000	Tidak miskin	1.000.000	500.000	Tidak miskin
35	2	250.000	125.000	Tidak miskin	1.000.000	500.000	Tidak miskin

Keterangan:

- 1). Jumlah anggota keluarga adalah suami, istri dan anak yang belum menikah/bekerja

- 2). Garis kemiskinan di daerah pedesaan Barat bulan Maret tahun 2007 sebesar Rp. 158.579,- per kapita perbulan
- 3). Garis kemiskinan di daerah pedesaan Jawa Barat bulan Maret tahun 2009, sebesar Rp. 179.835,-

Pada tabel 2, selanjutnya diketahui juga bagaimana kondisi penghasilan anggota LPP Mandiri di Desa Loyang ditinjau dari kriteria garis kemiskinan dalam dua kondisi yaitu sebelum dan sesudah pemberdayaan. Berdasarkan ketentuan angka garis kemiskinan bulan Maret 2007 garis kemiskinan adalah sebesar Rp 158.579 per kapita per bulan, sehingga berdasarkan pada ketentuan tersebut anggota LPP Mandiri di Desa Loyang, dari 35 orang yang mengikuti pemberdayaan sebagai sampel dalam evaluasi ini, sebelum pemberdayaan sebagian besar atau sebanyak 62,86% berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian sesudah pemberdayaan, sebanyak 21 orang atau sebesar 60% masih tetap berada dalam kondisi ekonomi di bawah garis kemiskinan. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa menurut hasil survei sosial ekonomi Nasional oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, untuk tahun 2009 garis kemiskinan di daerah pedesaan adalah sebesar Rp 179.835,- (BPS, 2009:181).

Dengan demikian, keadaan ini menunjukkan hanya ada sedikit peningkatan kondisi ekonomi mereka yaitu hanya sebesar 2,86%, apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2007.

2. Kondisi Kebutuhan Hidup Pokok

Kebutuhan dasar anggota LPP yang dalam hal ini meliputi pangan, pakaian dan rumah tinggal, kondisi masing-masing dirasakan oleh sebagian besar anggota LPP mencukupi, sesudah mereka mengikuti pemberdayaan bahkan mengenai pangan dan pakaian ada diantaranya yang mengatakan lebih dari cukup.

Mereka yang mengatakan cukup dalam hal makan sebelum ikut pemberdayaan sebesar 57,14% sekarang meningkat menjadi 91,43%. Mereka yang mengatakan kebutuhan makan kurang tercukupi sebesar 42,86%, sekarang sudah tidak ada lagi, malah ada beberapa orang yang mengatakan lebih dari cukup (8,57%).

Demikian juga dalam hal ketercukupan kebutuhan pakaian, sekarang tidak ada lagi yang merasa kekurangan pakaian. Sebagian besar

merasa tercukupi (82,86%). Dan mereka yang mengatakan lebih dari cukup meningkat sampai separuhnya yaitu dari 8,57% menjadi 17,14%. Pada waktu sebelumnya, yang mengatakan tercukupi hanya mencapai 45,71%, tetapi ada yang mengatakan lebih dari cukup sebesar 8,57%, sementara yang lainnya mengatakan kurang masih banyak jumlahnya sama dengan yang mengatakan cukup yaitu 45,71%.

Sesudah ada pemberdayaan, dari 35 orang anggota LPP Mandiri yang menjadi sampel dalam evaluasi ini, status rumah tinggal mereka lebih baik karena hampir semua anggota LPP telah memiliki rumah milik sendiri telah mencapai 91,43%. Yang lainnya adalah: sebanyak 5,71% berstatus menumpang di orang tua, dan 2,86% menyewa. Sedangkan pada waktu sebelumnya hanya 68,57% yang status rumahnya milik sendiri, lainnya adalah menumpang pada orang tua 25,71%, dan menyewa sebanyak 5,71%.

Dari segi kondisi rumah tinggal baik sebelum maupun sesudah pemberdayaan sebagian besar mengatakan sudah cukup. Mereka yang merasa kondisi rumahnya cukup, jumlahnya meningkat sesudah ada pemberdayaan, semula 51,43% meningkat menjadi 85,71%. Sementara itu yang merasa lebih dari cukup jumlahnya tetap, sedangkan yang merasa kurang jumlahnya menurun sesudah ada pemberdayaan.

3. Keberdayaan Anggota LPP Mandiri Dalam Usaha Ekonomi

Dari segi usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, semua anggota LPP Mandiri di Desa Loyang yang termasuk dalam kelompok evaluasi ini mengatakan mempunyai usaha, dan bahkan ada yang memiliki usaha sampingan. Dari 35 orang anggota LPP Mandiri, sebanyak 52,29% mempunyai satu macam pekerjaan saja, dan sebanyak 45,71% mengatakan mempunyai pekerjaan sampingan selain pekerjaan tetap.

Ditinjau dari segi tugas mencari nafkah, baik sebelum maupun sesudah pemberdayaan sebagian besar dari anggota LPP Mandiri Desa Loyang mengatakan tugas bersama antara suami dan istri. Sebelum pemberdayaan sebanyak 77,14 % yang mengatakan dikerjakan bersama, sementara sesudahnya naik menjadi 80 %. Mereka yang mengatakan sebagai pelaksana utama dalam tugas mencari nafkah pa-

da waktu sebelum pemberdayaan sebanyak 22,86 % dan sesudahnya menurun menjadi 20%. Dengan demikian semua anggota pada hakekatnya antara suami dan istri secara bersama berperan dalam kegiatan mencari nafkah keluarga. Di antara mereka tidak ada yang mengatakan tidak terkait dalam hal tersebut.

4. Analisis Uji Beda Keberhasilan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Dari hasil pengujian dengan menggunakan metode uji beda dengan statistik non parametrik *Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks*, diketahui ada perbedaan yang signifikan pada kondisi-kondisi kesejahteraan sosial anggota LPP Mandiri di Desa Loyang yang meliputi kondisi sosial ekonomi, sosial psikologis dan mental spiritual. Untuk membuktikan hal tersebut, mengacu kepada John T. Roscoe tentang alat uji beda "*Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks*". Hasil hitung nilai T dibandingkan dengan nilai T yang tercantum pada tabel "*Critical Values of the Wilcoxon Signed-Rank Test*" $n = 50$ (lihat mhtml:file://D:\wilcoxon Table.mht) 12/1/2009.

Untuk tingkat signifikansi yang dikehendaki dan nilai yang layak dari N, maka tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,01. Roscoe mengatakan: "jika nilai hitung sama atau lebih kecil dari pada nilai yang tercantum pada tabel, hipotesis nol ditolak, dan perbedaan-perbedaan yang diamati dalam rank signifikan. Jika nilai hitung lebih besar dari pada nilai yang tercantum pada tabel, hipotesis nol diterima, dan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam rank. Selanjutnya dikatakan oleh Roscoe bahwa: nilai nol yang tercantum pada rank tidak diperhitungkan (Roscoe, J.T, 1975:239-240).

Oleh karena dalam rank ada 10 buah nilai 0, maka jumlah N yang digunakan sebagai dasar kalkulasi adalah $35 - 10 = 25$. Rank dihitung dengan menggunakan rumus :

$$R = Cf - \frac{f}{2} + 0,5$$

Berdasarkan pada hasil hitung T positif = 321, dan T negatif = 4, maka T minimum adalah 4. Apabila dibandingkan dengan nilai T hitung yang tercantum pada tabel "*Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks*" tersebut, maka dengan $n = 25$ dan tingkat signifikansi 0,01

untuk dua sisi, ternyata nilai $T = 77$, dengan demikian T minimum hasil hitung lebih kecil. Oleh karena itu, hipotesis nol (tidak ada perbedaan dalam rank pada kondisi sebelum dan sesudah pemberdayaan), ditolak, atau dengan kata lain hipotesis alternatif (ada perbedaan dalam rank pada kondisi sebelum dan sesudah pemberdayaan) diterima. Dengan demikian perbedaan kondisi-kondisi anggota LPP Mandiri di Desa Loyang secara ekonomi adalah signifikan. Untuk mengetahui kalkulasi secara terinci pada tabel 3 berikut:

Tabel 3:

Kalkulasi Nilai rank pada kondisi sosial ekonomi, Anggota LPP Mandiri di Desa Loyang, Kondisi awal Sosial Ekonomi sebelum dan sesudah pemberdayaan

Urutan Urut	Anggota awal Pemberdayaan (%)	Penghasilan Setelah Pemberdayaan (%)	Rank $B = \frac{1}{2}(a + b)$	Ranking	Posisi	Target
1	900.000,-	1.000.000,-	900.000,-	19,5	19,5	
2	900.000,-	900.000,-	0	0		
3	900.000,-	900.000,-	0	0		
4	400.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	24	24	
5	300.000,-	900.000,-	900.000,-	19,5	19,5	
6	500.000,-	900.000,-	0	0		
7	900.000,-	1.000.000,-	900.000,-	23	23	
8	1.000.000,-	1.000.000,-	900.000,-	19,5	19,5	
9	300.000,-	900.000,-	0	0		
10	1.000.000,-	1.000.000,-	0	0		
11	900.000,-	400.000,-	250.000,-	9,5	9,5	
12	900.000,-	900.000,-	900.000,-	6	6	
13	900.000,-	1.000.000,-	900.000,-	14,5	14,5	
14	900.000,-	400.000,-	900.000,-	9,5	9,5	
15	900.000,-	900.000,-	400.000,-	17	17	
16	1.000.000,-	1.000.000,-	0	0		
17	900.000,-	400.000,-	250.000,-	9,5	9,5	
18	900.000,-	1.000.000,-	900.000,-	22	22	
19	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	25	25	
20	900.000,-	900.000,-	900.000,-	14,5	14,5	
21	900.000,-	900.000,-	900.000,-	4	4	
22	2.000.000,-	3.000.000,-	900.000,-	19,5	19,5	
23	900.000,-	900.000,-	900.000,-	19,5	19,5	
24	900.000,-	900.000,-	0	0		
25	900.000,-	900.000,-	900.000,-	14,5	14,5	
26	900.000,-	900.000,-	0	0		
27	900.000,-	900.000,-	900.000,-	4	4	
28	900.000,-	400.000,-	400.000,-	1	1	
29	900.000,-	900.000,-	900.000,-	2	2	
30	1.000.000,-	1.000.000,-	0	0		
31	900.000,-	900.000,-	0	0		
32	900.000,-	900.000,-	900.000,-	4	4	
33	900.000,-	400.000,-	900.000,-	9,5	9,5	
34	900.000,-	400.000,-	900.000,-	9,5	9,5	
35	900.000,-	400.000,-	900.000,-	9,5	9,5	

Keterangan: Menghitung Rank $B = \frac{1}{2}(a + b)$
 Dengan alpha (α) 0,01 untuk dua sisi dan n = 35, diperoleh t tabel = 77
 t hitung = 4
 tolak H₀ apabila t minimum < atau > t
 terima H₀ apabila t minimum > 77

21 positif = 321
 21 negatif = 4

V. KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa: Pertama, pengorganisasian masyarakat berhasil mewujudkan suatu lembaga yang berperan dalam pemberdayaan perempuan yang diberi nama LPP Mandiri. Anggotanya terdiri dari kaum perempuan yang mayoritas berkecukupan lemah. Ditinjau dari peran dan fungsi dalam segi ekonomi, lembaga ini antara lain telah berperan sebagai lembaga keuangan mikro dalam bentuk koperasi simpan pinjam. Dalam hal ini telah berhasil meningkatkan penghasilan sebagian besar anggotanya.

Kedua, para anggota LPP Mandiri pada dasarnya memahami fungsi dan peran organisasi sebagai tempat pembinaan dan tempat simpan pinjam uang bagi anggota, tempat menyampaikan pendapat, tempat silaturahmi.

Ketiga, kegiatan LPP Mandiri dalam hal pemberdayaan ekonomi anggotanya pada dasarnya melaksanakan kemudahan bantuan pinjaman modal usaha berupa uang dengan uang jasa yang relatif kecil menurut pendapat anggota. Kegiatan ini dapat diterima oleh para anggota karena pada kenyataannya dapat memutus mata rantai keterikatan kepada rentenir yang beroperasi di desa setempat.

Kempat, dengan uji beda statistik non parametrik, adanya LPP Mandiri berhasil dapat meningkatkan kondisi ekonomi anggotanya secara signifikan, walaupun pada kenyataannya kondisi sosial ekonomi pada sebagian besar anggota LPP Mandiri apabila diukur dengan ketentuan garis kemiskinan yang ditetapkan untuk daerah setempat masih berada di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, program pemberdayaan perempuan yang diterapkan di desa ini efektif dan perlu keberlanjutan serta berkoordinasi dengan berbagai sektor terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anonim (2009): Statistik Indonesia Tahun 2009, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Kerlinger, Fred, N. (1976): *Foundations of Behavioral Research, second edition*, A Holt International Edition, London.

Roescoe, John, T (1974), *Fundamental Research Statistics for Behavioral Sciences, second edition*, 1974, Holt Rinehart and Winston, Inc., New York.

Skidmore, Rex, A. et.al, (1994): *Introduction to Social Work, Sixth dition*, New Jersey, Prentice Hall Inc., A Paramount Communication Company, Englewood Cliff.

Internet

(mhtml:file://D:\willcoxon Table.mht) : *Wilcoxon Table: Critical Values of the Wilcoxon Signed-Rank Test, n = 50*, Tanggal 12/ 1/2009.

Surat Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia dengan Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Mandiri (Nomor 234 B-1/PS/IX/2006 dan Nomor 01/LPP Mandiri-Ind/MOU/IX/2006 tentang Ujicoba Model Pemberdayaan Perempuan.

Perjanjian kerjasama Nomor 189/PS/PK/XI/2007 dan Nomor 01/LPP Mandiri-INDR/XI/2007 Tentang Pengembangan Ujicoba Model Pemberdayaan Perempuan.